Augmented Reality dalam Pengembangan Desa Wisata di Masa Pandemi

Afrinia Lisditya Permatasari SSi MSc
Dosen Prodi Geografi
Universitas Amikom Yogyakarta

INDONESIA merupakan salah satu negara yang memiliki banyak potensi dalam bidang pariwisata, yaitu meliputi wisata alam, seni, dan budaya. Unsur yang membedakan pariwisata Indonesia dengan pariwisata negara lain terletak pada budaya dan masyarakatnya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan keramahtamahan (hospitality services), sehingga menjadi salah satu daya tarik yang khas. Pengembangan pariwisata saat ini, diarahkan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan dan juga smart tourism. Salah satu unsur yang bisa dikembangkan dalam pembangunan berkelanjutan adalah potensi suatu desa. Pembangunan desa merupakan faktor penting bagi daerah dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Suatu desa dapat menjadi potensi wisata yang mengandalkan kekhasan wilayahnya yang akan dikembangkan, sehingga muncul istilah desa wisata, dimana dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan desa wisata sebagai destinasi periwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di Daerah Instimewa Yogkakarta dengan potensi sumberdaya alam yang bisa dikembangkan untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu alternatif strategis untuk pengembangan kegiatan dalam pariwisata. Desa Pandowoharjo yang terletak di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman mempunyai potensi wisata yang cukup beragam, diantaranya yaitu Desa Wisata Seni Pertunjukan, Desa Wisata Pertanian, Desa Wisata Ramah Anak, Desa Wisata Kampung Iklim, Desa Wisata Pendidikan, Desa Wisata Batik. Keenam desa wisata tersebut belum terkoneksi satu sama lain. Persebaran lokasi tersebut dapat dijadikan peta potensi wisata yang dapat dikembangkan dengan Teknologi Informasi. Salah satu metode yang dapat diterapkan yaitu dengan membuat konentivitas yang terpadu, berupa Augmented Reality (AR) sebagai Smart Tourism Guide Kabupaten Sleman Berdasarkan Geolokasi. Kegiatan pembuatan AR tersebut merupakan hasil penelitian bersama tim dosen Universtas AMIKOM Yogyakarta (Program Studi Arsitektur, Geografi dan Teknik Informatika) dengan dana hibah Bappeda Sleman tahun 2019. Pada akhir tahun 2019, muncul penyakit menular yaitu Covid 19. Severe acure respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2) atau disebut corona virus (Covid-19) merupakan jenis virus yang menimbulkan pneumonia dan beberapa gejala influenza lainnya seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Kasus ini pertama kali dijumpai di Wuhan Cina. Semenjak ditemukan kasus tersebut terjadi perluasan penyakit yang sangat cepat, bahkan hingga sampai di Indonesia. Virus tersebut mampu menular antar manusia melalui droplet atau percikan air yang berasal dari mulut atau hidung penderita covid-19. Akibat kondisi tersebut masyarakat diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan secara fisik dengan berada dirumah (meminimalisir kontak dengan orang lain), jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan secara berkala. Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya mobilitas manusia dan aktivitas manusia guna pencegahan tertular covid 19.

Kondisi pandemi tersebut berdampak pada aktivitas pariwisata, termasuk desa wisata di Pandowoharjo. Selama masa karantina, aktivitas wisata tersebut terhenti secara total. Salah satu upaya yang bisa menjadi solusi wisata di masa pandemi yaitu dengan memanfaatkan teknologi AR berbasis geolokasi. Tahap pembuatannya diawali dengan melakukan survei dan pemetaan wisata di Pandowoharjo. Kemudian melakukan desain masterplan dengan menggunakan icon pada masing-masing desa wisata. Informasi yang bisa diperoleh dari aplikasi AR tersebut daintaranya yaitu fasilitas, sarana prasarana, biaya, lokasi yang terkoneksi dengan google maps, video profil masing-masing desa wisata serta informasi terkait kegiatan wisata yang ditawarkan. Semua informasi tersebut dapat diakses melalui website www.pandowoharjo.org. Pengembangan teknologi AR dalam pariwisata, saat ini sangat dibutuhkan. Terutama pada masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia. Dimana masyarakat di batasi dalam melakukan aktivitas. Teknologi AR dalam pariwisata membantu memberikan informasi kepada masyarakat, sebelum mereka melakukan perjalanan wisata. Masyarakat dapat mengenali kondisi geografis daerah yang akan dituju, serta akan membuat mereka merasa menguasai daerah yang akan dituju. Pihak pemerintah Desa Pandowoharjo dan para pengurus desa wisata merasa sangat terbantu dengan adanya implemtasi pengembangan AR tersebut. Penguatan dalam pengelolaan desa wisata menjadi perhatian penting untuk mengembangkan desa wisata. ***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Polosoro dan Polres Purworejo Jalin Kerja Sama

PURWOREJO (KR) - Puluhan kepala desa (kades) pengurus Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Purworejo (Polosoro) menggelar diskusi dengan Polres Purworejo, Selasa (29/12). Mereka berdiskusi tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan dana transfer Desa. Ketua Polosoro Suwarto mengatakan, diskusi digelar untuk memberi pemahaman lebih kepada kades dan perangkat desa tentang adanya potensi permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan dana transfer desa. "Desa ini menerima beberapa jenis dana transfer, mulai ADD hingga Dana Desa. Tentu perlu adanya pemahaman lebih tentang bagaimana mengalokasikannya agar sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran," tuturnya kepada *KR*.

Kegiatan tersebut merupakan amanah dari Musda Polosoro yang diselenggarakan di Yogyakarta belum lama ini. Diskusi dan konsultasi hukum dengan kepolisian, lanjutnya, dirasa perlu karena latar belakang perangkat dan serta pemerintah desa yang beragam. Menurutnya, kepala dan perangkat desa berasal dari berbagai latar belakang mulai petani, buruh, wiraswasta, atau pensiunan ASN. Sebagian besar anggota Polosoro yang totalnya berjumlah kurang lebih 5.200 orang itu tidak memahami hukum dan regulasi secara mendalam.

Selain latar belakang pendidikan, kondisi itu lantaran kerap berubahnya regulasi terkait pemerintahan desa. "Belum selesai belajar sudah ada aturan baru yang keluar. Seringkali perangkat dan kades agar kesulitan mengikuti, sehingga jika tidak diantisipasi mereka bisa tersangkut hukum, padahal niatannya baik untuk membangun desa," terangnya.

Selain diskusi, Polosoro membuat nota kerja sama dengan Polres Purworejo. Polosoro, lanjutnya, berkomitmen untuk selalu menjaga kondusifitas wilayah, mengedepankan tindakan preemtif dan preventif dalam menyikapi masalah di wilayah, melakukan pembinaan hukum rutin untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana transfer di desa, serta bersama-sama dalam menjalankan roda pemerintahan. **(Jas)**

MPTS Antisipasi Longsor di Desa Pager Jurang

KLATEN (KR) - Masyarakat Desa Pager Jurang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, melakukan penghijauan di lereng-lereng jurang, Selasa (29/12). Hal ini sebagai upaya antisipasi erosi dan tanah longsor, serta untuk pelestarian sumber daya air. Kepala Desa Pager Jurang, Nur Amir mengemukakan, bibit trembesi ditanam di pereng - pereng jurang sepanjang 2 Km. Selain itu juga penanaman bibit pohon sirsak dan kopi pada lahan sekitar 3 km hingga 5 km. Masih ada lagi, yakni bibit kopi yang juga ditanam di tanah-tanah pereng yang kini masih belum dimanfaatkan.

Nur Amir menjelaskan, bibit tanaman keras tersebut merupakan bantuan dari PT Tirta Investama Klaten, bekerja sama dengan LPTP. Diharapkan ke depan, tanaman tersebut akan tumbuh dan bisa menghasilkan, sehingga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat Desa Pagerjurang. "Tanah di sini luas, setiap 1.500 - 2.000 meter persegi hanya dihuni 1 KK. Jadi masih banyak pekarangan yang bisa dimanfaatkan. Pager Jurang juga sentra penghasil susu. Jumlah sapi lebih banyak dibanding jumlah warga," kata Nur Amir.

Stakeholder Relation Manager PT Tirta Investama Klaten, Rama Zakaria mengemukakan, kegiatan penghijauan dilakukan secara rutin setiap tahun, difokuskan pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Pusur. Hal ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dari hulu, tengah dan hilir. "Kali ini dilakukan penghijauan di wilayah hulu. Ini penting untuk keberlanjutan sumber daya air di wilayah tengah sampai hilir," jelas Rama Zakaria.

Aksi kolektif tersebut melakukan penanaman sebanyak 739 multy purpose tree species (MPTS). Yakni tanaman dengan beragam fungsi, baik dari kayu, daun, buah hingga akarnya. Dengan demikian tanaman tersebut akan bermanfaat untuk konservasi, serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat setempat.

Camat Musuk, Ny Tatik Purwaningsih, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengemukakan, penanaman pohon harus ditindaklanjuti dengan perawatan sebaikbaiknya. "Menanam itu mudah, yang susah itu merawatnya. Jangan berharap apa yang kita dapat sekarang, nanti anak cucu yang akan memetik hasilnya," kata Tatik. **(Sit)**

KR-Sri Warsiti

Rama Zakaria menyerahkan bibit MPTS pada Kades Pager Jurang.

ANTISIPASI KERAWANAN MALAM TAHUN BARU

Kapolda Jateng Safari Tinjau Wilayah Perbatasan

BLORA(KR) - Menjelang pergantian tahun dari 2020 menuju 2021, jajaran Polda Jateng sibuk memantau situasi di Pantura sebelah timur Jateng. Peninjauan pada Rabu (29/12) untuk mengetahui situasi tidak hanya wilayah Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, tetapi juga sampai di Pos Pelayanan Operasi Lilin Candi 2020 Polres Blora, tepatnya di Pos Yan perbatasan Cepu - Jawa Timur.

Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Ahmad Lutfi bersama rombongan di Cepu disambut Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan SIK MHum beserta Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi SE MM bersama pejabat utama Polres dan Kodim 0721/Blora.

"Pemantauan di wilayah perbatasan ini untuk antisipasi kerawanan pada malam pergantian tahun, baik dari gangguan kamtibmas ataupun pelanggaran protokol kesehatan yang dimungkinkan terjadi saat malam Tahun Baru," ungkap Ahmad Lutfi. Disebutkan, di pos perbatasan provinsi Jateng dengan provinsi luar Jateng telah dilakukan urai arus. Yaitu arus yang ke dan dari Jateng akan dilakukan penyekatan pada saat malam pergantian tahun. Apalagi di Blora sudah ada Surat Edaran dari Bupati Blora terkait tidak ada pengumpulan massa pada saat Tahun Baru 2021.

Ahmad Lutfi menegaskan selama perayaan malam Tahun Baru tidak ada petasan ataupun kembang api. Untuk antisipasi hal tersebut akan dilakukan patroli mobiling yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Polri dan TNI serta instansi terkait lainnya. "Untuk antisipasi kerawanan malam pergantian tahun akan dibentuk gugus tugas khusus pengamanan, yang terdiri dari tim gabungan, untuk antisipasi Covid-19. Termasuk juga kegiatan di hotel-hotel, ruang pertemuan ataupun tempat wisata akan diperketat penjagaannya, jangan sampai menimbulkan kerumunan saat malam tahun baru," urai Ahmad Lutfi

Sementara itu untuk kendaraan ke luar masuk di perbatasan Jateng, akan diberlakukan skala prioritas. Kendaraan yang boleh lewat hanya kendaraan yang mengangkut barang kebutuhan pokok ataupun kendaraan penumpang umum. **(Cry/Cuk)**

MUHAMMADIYAH STEPS UMY

Luncurkan Pesantren Sehat dan Ramah Anak

KEBUMEN (KR) - Program 'Pesantren Sehat dan Ramah Anak' tidak hanya berorientasi kesehatan guna mendukung sarana pembangunan masyarakat. Namun program ini membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, salah satunya kemiskinan.

Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz mengemukakan hal itu pada peluncuran program 'Pondok Pesantren Sehat dan Ramah Anak', Selasa (29/12) kerja sama Muhamadiyah Steps UMY dan Pemkab Kebumen.

Program 'Pesantren Sehat dan Ramah Anak' sebagai sebagai bentuk komitmen dan kontribusi perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat terkait perilaku hidup sehat dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Huda dan Ponpes Al-Kamal Kebumen.

"Program ini merupakan program promosi kesehatan yang efektif dilakukan dengan melibatkan institusi pendidikan salah satunya ponpes. Terlebih dalam kehidupan Islamiyah, pesantren sudah memiliki dan memegang konsep *jangan menyakiti diri sendiri dan orang lain*. Maka melalui peran serta kiai, ustadz maupun ustadzah, serta para santri, konsep kesehatan yang bersifat promotif-prefentif dapat diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat," jelasnya

Yazid menyampaikan, program ini sekaligus menjawab permasalahan pandemi Covid-19 dengan adanya edukasi penerapan protokol kesehatan hingga membuat kawasan tanpa rokok. Edukasi itu untuk mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19.

Menurut Yazud, program tidak lepas dari komitmen yang diwujudkan dengan penetapan dan penegakan peraturan desa tentang kawasan tanpa rokok untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Hal itu sejalan dengan penetapan ponpes sehat dan ramah anak sebagai salah satu tempat pendidikan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Project Director Muhammadiyah Steps UMY dr Supriyatiningsih, SpOG MKes menyatakan kegiatan ini diapresiasi Kementerian Agama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu program terobosan dan inovasi yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Ini merupakan salah satu program terobosan dan inovasi sinkronisasi yang efektif untuk mencapai tujuan Pemerintah Indonesia. Salah satunya pembangunan SDM dengan mengatasi dan mencegah *future binding constraint*," ujar dr Supriyatiningsih. **(Fsy)**

KR-Istimewa

Pengurus Muhammadiyah STEPS UMY bersama Bupati Kebumen.

DPRD Boyolali Genap Berusia 70 Tahun

BOYOLALI (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, genap menginjak usia 70 tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur, jajaran anggota DPRD Kabupaten Boyolali menggelar peringatan hari jadi dengan menggelar rapat paripurna istimewa di ruang sidang gedung DPRD setempat, Selasa (29/12). Tidak ada acara khusus yang digelar dalam peringatan hari jadi kali ini mengingat masih berada di masa pandemi Covid-19.

Sidang dipimpin Ketua DPRD S Paryanto, dihadiri Bupati Boyolali Seno Samodro. Dalam kesempatan tersebut S Paryanto menjelaskan bahwa tahun ini merupakan kali keempat peringatan tersebut digelar dengan mengambil tema 'Bersama Masyarakat Kita Tanggulangi Covid-19'. Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan sejarah berdirinya DPRD Boyolali yang resmi berdiri pada tanggal 29 Desember 1950.

"Tema tersebut adalah perwujudan dari semangat kita bersama untuk ikut membantu menanggulangi bencana Covid-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bangsa Indonesia, juga di seluruh dunia," terang Paryanto. Disinggung mengenai fungsi DPRD yakni legislasi, pada tahun 2020 ini, DPRD Kabupaten Boyolali berhasil membahas eksekutif telah membahas 25 Rancangan Peraturan Daerah dan satu Peraturan DPRD Kabupaten Boyolali.

"Harapan kami semakin tambah meningkat kualitas produktif, yang paling penting adalah produktif. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang menjadi satu bentuk payung hukum dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Boyolali," ungkapnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Seno Samodro mengucapkan selamat kepada DPRD yang merayakan Hari Jadi ke-70. **(*-1)**

Jangan Tunda Niat Berhaji

Penyelenggaraan haji tahun 2020 mengalami penundaan akibat Covid-19, meski begitu niat baik menunaikan ibadah haji sebaiknya jangan ditunda. Terlebih bagi umat muslim yang sudah mampu secara finansial. Seringkali berbagai kebutuhan membuat lupa untuk memprioritaskan ibadah haji, apalagi saat ini antrian haji kian Panjang mencapai 20 tahun tergantung embarkasi pemberangkatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menegaskan ibadah haji merupakan kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi umat Muslim yang sudah mampu atau *istitha'ah*. Mereka yang sudah mampu dan telah mendaftar haji, tetapi wafat sebelum melaksanakan, *azzam* atau niatnya sudah dicatat pahala haji oleh Allah SWT. Maka, jangan tunda niat mendaftar haji terlalu lama ya. Berikut ini Admin Mina dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menjawab berbagai pertanyaan masyarakat seputar penyelenggaraan haji. Yuk disimak,

1. **Tanya :** *Apa bedanya Tugas Kemenag dengan BPKH dalam hal penyelenggaraan haji?*
   Mina Menjawab :
   Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk melalui amanat undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. BPKH mulai bekerja tahun 2017, perbedaannya dengan Kemenag antara lain BPKH bertugas mengelola Keuangan haji sementara Kemenag melakukan Operasional penyelenggaraan haji, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan. Dalam penyelenggraan Ibadaha haji, biaya riil yang diperlukan mencapai kurang lebih Rp.70 juta/jemaah sedangkan yang dibayarkan oleh jemaah hanya Rp.35,2 juta sehingga selisih inilah yang diupayakan oleh BPKH dari hasil investasi Syariah atas setoran awal jemaah sebesar Rp. 25 juta yang mengendap sembari menanti saat keberangkatan.

2. **Tanya :** *Dulu ada istilah ONH sekarang Bipih. Kedua istilah itu maksudnya apa Min?*
   Mina Menjawab :
   Pada masa lampau ONH adalah akronim dari Ongkos Naik Haji, diganti Bipih (Biaya perjalanan haji) pada tahun 2014. Pendaftaran ibadah haji sendiri ada yang melalui jalur reguler yakni diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Pemerintah. Haji khusus/ haji Plus diselenggarakan oleh KBIH/ Agen travel haji yang telah memiliki ijin operasional dari pemerintah.

3. **Tanya :** *Lalu, apa bedanya BPIH, dan Bipih?*
   Mina Menjawab :
   Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah penyebutan untuk keseluruhan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Sedangkan Bipih adalah biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji sebesar Rp.35,2 Juta. Biaya haji tidak dapat dilunasi di depan, masyarakat hanya bisa membayarkan setoran awal sebesar Rp.25 juta untuk mendapatkan daftar tunggu/nomor porsi haji. Pelunasan setoran haji dilakukan setelah nama calon jemaah diumumkan sebagai yang berhak berangkat pada tahun tersebut dan melunasi besaran Bipih yang telah ditetapkan sesuai keputusan Pemerintah sekaligus sudah mendapat Persetujuan dari DPR.
   Terhitung sudah empat tahun besaran Bipih Rp.35,2 juta tidak mengalami penyesuaian. Untuk menutup Biaya riil yang dibutuhkan tiap jemaah sebesar Rp.70 juta jika yang dibayarkan hanya Rp.35,2 juta, maka untuk selisihnya dilakukan subsidi BPIH dari nilai manfaat dari hasil investasi yang dilakukan oleh BPKH.

4. **Tanya :** *Apakah benar Dana haji bisa dipergunakan untuk kepentingan lain diluar Haji?*
   Mina menjawab :
   Dana haji digunakan untuk berbagai investasi Syariah yang hasilnya berupa nilai manfaat. Nilai manfaat inilah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji setiap tahun. Dana haji dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Dana tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar keperluan penyelenggaraan haji.

5. **Tanya :** *Bagaimana dengan kabar penangguhan penerbangan di Arab Saudi?*
   Mina menjawab :
   Pada Senin (21/12/2020) lalu Arab Saudi mengumumkan penangguhan semua penerbangan internasional untuk pengunjung. Penangguhan ini juga berlaku untuk pintu masuk ke Kerajaan melalui jalur darat dan laut. Sumber resmi di Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan tentang penyebaran virus corona jenis baru yang bermutasi di sejumlah negara. Mari kita berdoa agar Covid segera Berlalu dan Ibadah haji dan Umroh dapat berjalan seperti sediakala.